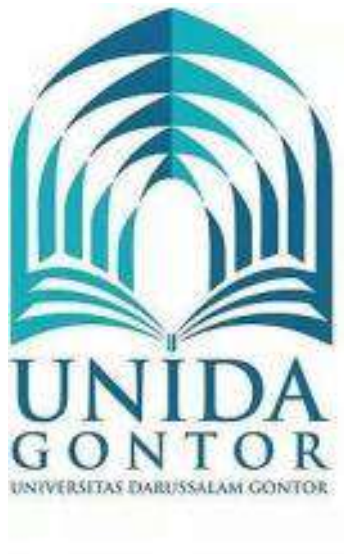


**LAPORAN MAGANG**  
**Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
**Wilayah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur**



**Dosen Pembimbing :**

Hesti Rokhaniyah, S.Pd., M.Pd.,

**Di susun oleh :**

Gilang Zaidan Prastyo 402019511016

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**2022/2023**

**LAPORAN MAGANG**  
**MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

Di persiapkan dan Di susun oleh :

Gilang Zaidan Prastyo 402019511016

Yang di pertanggung jawabkan di depan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Pada Tanggal November 2022

**Ustadzah Hesti Rokhaniyah, S.Pd. , M.Pd.**

**NIY. 150444**

Laporan ini telah di terima sebagai salah satu pembuktian magang

Ponorogo, 2022

**Ketua Program Studi Hubungan Internasional**

**Ustadzah Novi Rizka Amalia, S.IP., MA**

**NIY. 150415**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Tidak lupa shalawat beserta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan segala bentuk syafaatnya sehingga penulis dapat menuliskan laporan akhir magang ini. Tiada kata yang bisa di ucapkan selain kata syukur karena program magang dapat berjalan dengan lancar dan tiada kendala dalam melaksanakan tugas selama program magang berjalan. Tanpa adanya berkat do'a dan bantuan, penulis tidak bisa melaksanakan program magang dengan baik dan sempurna.

Penulis menyadari bahwa magang yang telah di laksanakan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari atau selama satu bulan, tidak cukup untuk menjadikan penulis sebagai individu yang dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi *problem solver* bagi setiap permasalahan yang berkembang di dalamnya. Dan belum bisa menguasai laporan permasalahan dari masyarakat yang datang di hari-hari tertentu, serta memahami hukum dan hak asasi manusia. Tidak jauh sama dengan laporan magang ini, yang penyusunan dalam setiap kata tidak begitu sempurna akan tetapi penulis berusaha menyusun tulisan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dengan bimbingan dan nasehat serta saran dari dosen pembimbing untuk menjadikan laporan magang ini menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih, kepada dosen pembimbing magang ustadzah Hesti Rokhanyah, S.Pd., M.Pd dan selaku pembimbing magang ibu Wiwit Purwani Iswandari karena telah membantu dan memberikan dukungan hingga pada kesuksesan program magang ini. Dan taklupa do'a dan dukungan yang selalu mengalir dari kedua orang tua yang menjadikan program magang ini bisa menjadi sukses dari awal hingga akhir selesainya program magang ini. Terimakasih kepada segenap jajaran dosen program studi hubungan internasional karena telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan program magangnya di KEMENKUMHAM.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat memberi manfaat untuk banyak pihak dan pembaca, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, peluang dan kesempatan yang ada di instansi ini. Kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menggali pengalaman kerja lebih banyak pada kementerian hukum dan hak asasi manusia (KEMENKUMHAM) di lain waktu.

# LEMBAR PENILAIAN MAGANG

PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA  
DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG

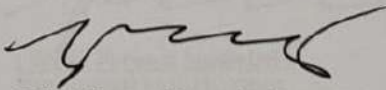
Nama & NIM : Gilang Zaidan Partyo / 402019511016  
Nama & Alamat PKN : KEMENKUMHAM  
Surabaya, Jawa Timur  
Indonesia  
Pembimbing Lapangan : Wiwit Purwani Iswandari  
Lama PKN : 1 Bulan

NO.	ITEM EVALUASI	NILAI
1.	Etos kerja di lapangan	89
2.	Pelaksanaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan	88
3.	Kemampuan bekerja dalam tim	88
4.	Kemampuan melakukan inisiatif dalam pekerjaan	85
5.	Kemampuan memberikan ide-ide kreatif	89
6.	Kehadiran di lokasi magang	89
TOTAL NILAI		527

\*Nilai dalam Bentuk angka 1 – 100

Surabaya, 16 september 2022

Pembimbing Lapangan,



( Wiwit Purwani Iswandari )  
NIP. 196601131911032001

# NILAI FINAL LAPANGAN/SURVEI/MAGANG PRAKTEK KERJA NYATA

DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG

Nama Tempat PKN : BIDANG HAM - DIVISI JANKUM & HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JATIM  
S. CBY

Pembimbing Lapangan : WIWIT PURWANI ISWANDARI, SH, MH

Lama PKN : .....

$$\text{Nilai Rata-Rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{6} = \frac{527}{6} = \underline{\underline{87,3}}$$

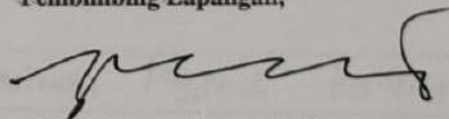
## Keterangan Nilai:

Nilai diberikan dalam bentuk angka  
mulai 0 s/d 100, dengan acuan sbb:

A	=	80 < - 100
B+	=	75 < - 80
B	=	69 < - 75
C+	=	60 < - 69
C	=	55 < - 60
D+	=	50 < - 55
D	=	45 < - 50
E	=	0 < - 44

Surabaya, 16 september 2022

Pembimbing Lapangan,



( Wiwit Purwani Iswandari )  
NIP. 196601131911032001

## LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

No.	Nama (Nomor Induk Mahasiswa)	Fakultas/ Prodi	Proposal/ Persiapan	Operasional	Laporan	Seminar Kegiatan Magang	Jumlah
1.	Gilang Zaidan Prastyo (402019511016)	Humaniora/ Hubungan Internasional					

Ponorogo, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Dosen Pembimbing Lapangan

**Hesti Rokhaniyah, S.Pd. , M.Pd.**

NIY. 150444

**LEMBAR BERITA ACARA KEGIATAN MAGANG MAHASISWA**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PENILAIAN MAGANG.....	ii
LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN.....	iv
LEMBAR BERITA ACARA KEGIATAN MAGANG MAHASISWA .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Tujuan Magang .....	3
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	3
BAB II.....	4
DESKRIPSI UMUM.....	4
A. Sejarah Singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	5
C. Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Timur.....	6
D. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	8
BAB III .....	9
DESKRIPSI KHUSUS.....	9
A. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	9
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Kantor Wilayah .....	11
BAB IV .....	12
HASIL LAPORAN MAGANG .....	12
A. Laporan Kegiatan Harian .....	12
B. Manfaat kegiatan magang .....	14
C. Tiga Pilar Magang .....	14
BAB V .....	16
KESIMPULAN .....	16



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Mahasiswa semester akhir program studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor harus melaksanakan program magang yang merupakan salah satu kegiatan wajib. Menurut Linda, Magang adalah proses penerapan pengetahuan atau kompetensi dari dunia pendidikan ke dunia kerja secara di mana pemegang bisa memahami sistem kerja dunia profesional yang sebenarnya. Menurut undang-undang, magang adalah bagian dari salah satu pelatihan kerja yang terselenggara di sebuah perusahaan. Dasar hukum yang mengatur tentang magang adalah Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 21 – 30 di UU. Selain itu, magang juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. Per.22/Men/IX/2009 yang juga membahas pemagangan ini secara spesifik di dalam negeri.<sup>1</sup>

Pada tanggal 18 Agustus 2022, penulis memiliki kesempatan untuk memulai melaksanakan program magang di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) di wilayah Surabaya di divisi Hak Asasi Manusia, kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu lembaga yang di miliki oleh negara. Lembaga tersebut merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman

---

<sup>1</sup> Linda juliawanti : “Pengertian magang”, <https://lifepal.co.id/media/apa-itu-magang/>, 12 Juli 2021

pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.<sup>2</sup>

Di hari pelaksanaan magang selama kurang lebih 1 bulan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di divisi hak asasi manusia, penulis mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu dalam mengatasi laporan masyarakat mengenai hak asasi manusia. Dan hal-hal baru lainnya tentunya tidak bisa di dapatkan dalam kelas perkuliahan. Seperti halnya dalam menangani laporan dari masyarakat mengenai hak asasi nya yang belum di dapatkan di kehidupannya. Kemudian, peserta program magang menulis kasus tersebut dan menganalisa apakah kasus ini termasuk dalam kriteria pelanggaran hak asasi manusia atau bukan. Jika benar, maka pihak pegawai staf hak asasi manusia menangani kasus tersebut kelapangan guna menganalisa kasus tersebut apakah sesuai dengan data laporan atau tidak. Apabila kasus tersebut lebih cenderung ke arah hukum maka bagian divisi hak asasi manusia (HAM) dan divisi hukum akan bekerja sama dalam menangani kasus ini.

Selama program magang ini, penulis diterima dan dibimbing dengan baik oleh para pegawai dan staf di divisi hukum dan hak asasi manusia. Pegawai dan staf memberikan penugasan kepada penulis dan memberi bimbingan mengenai penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Para pegawai dan staf di divisi hukum dan hak asasi manusia sangat ramah dan tak sungkan untuk memberikan semua ilmunya kepada mahasiswa magang. Karena, menurut mereka mahasiswa berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pengikut program magang. Walaupun terkadang penulis dengan rekan magangnya mengalami kebingungan dalam menangani kasus HAM dan Hukum. Karena dalam dunia perkuliahan mereka tidak di ajarkan mengenai hal tersebut. Selain itu, divisi HAM dan Hukum lebih cenderung cocok untuk mahasiswa program studi hukum. Akan tetapi ketua bagian divisi HAM memberikan tugas kepada mahasiswa magang sesuai dengan kemampuannya. Proses magang selama dua bulan tersusun di dalam laporan magang ini. Penulis berharap agar semua pihak yang terkait dalam program magang ini dapat saling mendapatkan pengalaman yang berarti dan dapat meningkatkan SDM mahasiswa selaku subjek atau pelaku magang.

---

<sup>2</sup> Wikipedia KEMENKUMHAM, "Sejarah kementerian Hukum dan HAM", <https://kemenkumham.go.id/profil/sejarah>, 8 september 2016

## **B. Tujuan Magang**

Bagi Prodi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, program magang ditetapkan sebagai salah satu pengabdian yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswanya. Adapun tujuan program ini sebagai berikut;

1. Memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa.
2. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa yang berkaitan dengan subjek perkuliahan yang telah dipelajari.
3. Sebagai sarana aktualisasi pengabdian diri kepada instansi yang dituju.
4. Membuka kesempatan *networking* antar instansi, universitas, maupun individu mahasiswa yang masih dalam batas keilmuan hubungan internasional.
5. Memenuhi kurikulum perkuliahan dengan format magang.
6. Sebagai sarana dakwah mahasiswa UNIDA Gontor di tempat penugasan.

Selama program magang, mahasiswa dituntut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ditugaskan oleh pihak instansi. Tugas tersebut berkaitan dengan menyusun artikel di power point, menulis data kasus, merevisi data divisi HAM, menganalisis masalah yang berkaitan dengan HAM, dan lain-lain. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat merasakan situasi dan pola bekerja yang nyata sesuai dengan instansi terkait. Agar ketika mahasiswa mendapatkan penugasan yang sama, mahasiswa tidak bingung untuk melaksanakannya. Upaya demikian merupakan cara instansi mendidik mahasiswa peserta magang.

Pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja semakin terbuka saat mengikuti program magang ini. Individu setiap mahasiswa akan lebih berkembang jika berinteraksi langsung dengan situasi yang ada di lapangan. Mahasiswa yang sebelumnya banyak menghabiskan waktu di kelas, perpustakaan, dan organisasi, yang cenderung kepada pengembangan diri, di dunia kerja mereka akan memasuki situasi dimana mereka akan menemukan hal-hal yang identik dengan senioritas, professional dalam bekerja, menyelesaikan *deadline*, kelangsungan instansi, lembur, kepentingan, ketepatan waktu, kompromi dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman yang pernah mereka rasakan saat magang akan memberi rangsangan terhadap dunia kerja yang akan mereka tentukan di masa mendatang.

## **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 18 september 2022. Penempatan magang yang penulis laksanakan berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) di kantor wilayah Jawa Timur di Kota Surabaya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini terletak di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur (60271).

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dibentuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedudukan kerjanya langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Penamaan suatu instansi pemerintahan bolehlah berubah seiring berkembangnya zaman dan kemajuan linguistik. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).<sup>3</sup>

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatar belakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.

---

<sup>3</sup> Wikipedia, "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Hukum\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia)

5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.<sup>4</sup>

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dalam bertugas, kementerian hukum dan hak asasi manusia (KEMENKUMHAM) langsung di bawah naungan presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Website Kemenkumham, “ Tugas dan Fungsi “, <https://kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>

### C. Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Timur

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana dikutip dari laman website resmi kementerian hukum dan hak asasi manusia kantor wilayah Jawa timur adalah sebagai berikut :

1. Visi

“ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. “

2. Misi

Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam tujuh misi, antara lain:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

3. Tata nilai “ Berakhlak “ di jelaskan sebagai berikut<sup>6</sup> :

Sejak 27 Juli 2021 silam, Kementerian PAN-RB meluncurkan *core values* dan *employer branding* baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Di resmikan langsung oleh presiden Joko Widodo, “*Berakhlak*” di kenalkan sebagai core values ASN di seluruh Indonesia dan bangga melayani bangsa sebagai *employer branding* ASN. *Ber AKHLAK* merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah di pahami dan di terapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan bangga melayani bangsa merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

*Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat. Namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo:

---

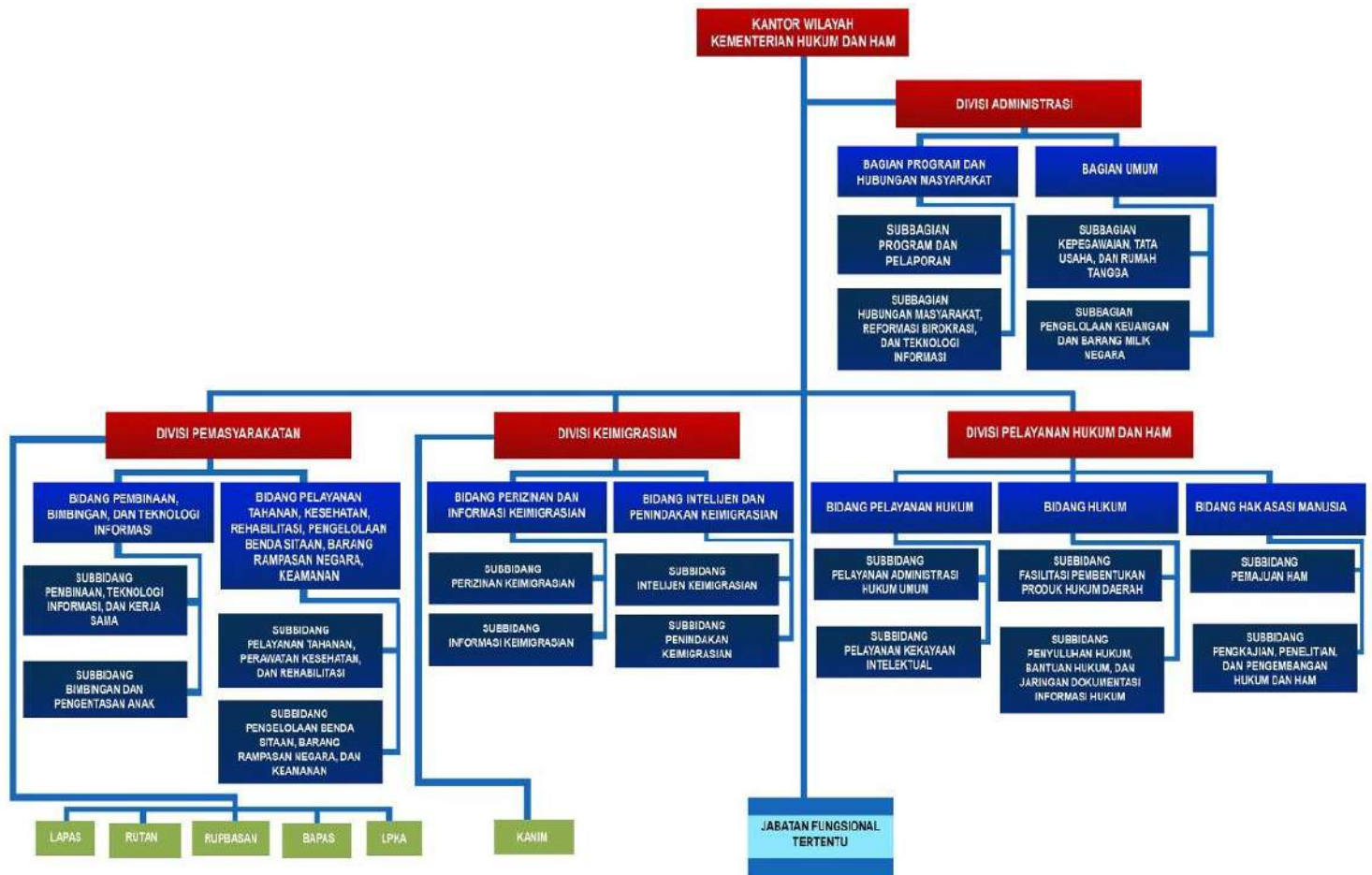
<sup>6</sup> <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>

*“ ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama “*

Dengan arti kalimat yang di ucapkan oleh presiden Joko Widodo menyimpulkan bahwa kualitas ASN yang berada di cabang tidak boleh berbeda dengan kualitas ASN yang berada di pusat. Demi melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan lebih baik dalam kualitas etos kerjanya. Kata berakhlak juga menjadikan perilaku dan sifat yang harus di miliki oleh setiap individu ASN untuk menjadikan masyarakat segan dalam menyampaikan keluhan dan laporan yang akan masyarakat sampaikan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena dari nilai “Berakhlak” masyarakat dapat menilai bahwa ASN memiliki perilaku atau sifat ramah dan sopan.

## D. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berikut merupakan gambaran mengenai struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Timur Kota Surabaya yang telah di atur dan di tulis dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia no. 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana struktur keorganisasiannya sebagai berikut<sup>7</sup> :



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Timur

<sup>7</sup> Pemenkumham RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



## **BAB III**

### **DESKRIPSI KHUSUS**

#### **A. Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945–1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999–2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001–2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004–2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009–sekarang)<sup>8</sup>.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi<sup>9</sup>:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Merancang susunan perundang-undangan kota atau provinsi.
3. Menindak lanjuti warga Indonesia yang melanggar perihal hukum dan hak asasi manusia.
4. Menerima dan menindak lanjuti laporan kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di lapangan dari surat atau masyarakat secara langsung.
5. Mengejek visa warga asing yang masuk ke negara Indonesia.
6. Menindak lanjuti warga asing yang visanya telah habis masa izinnnya untuk tinggal di negara Indonesia.
7. Menerima dan menampung imigran asing yang mengalami bencana.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

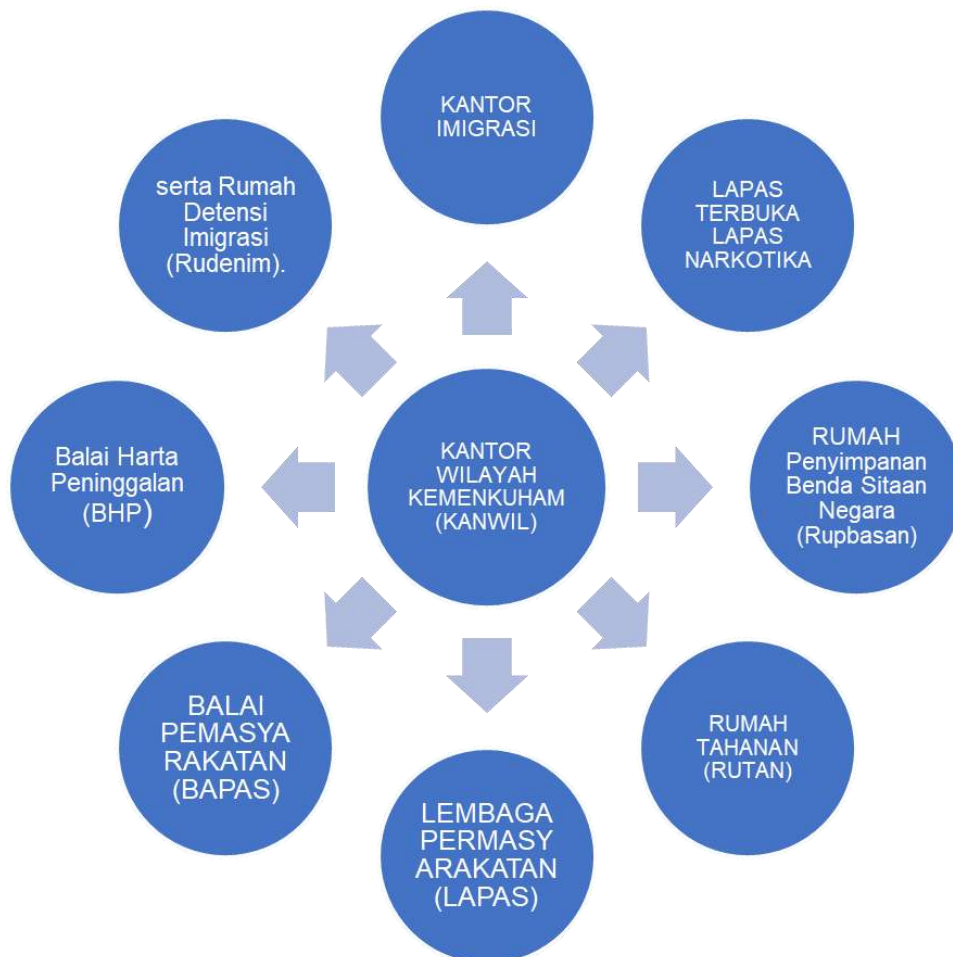
1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Imigrasi
4. Direktorat Jenderal Pemasarakatan
5. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi
14. Staf Ahli Bidang Sosial
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

---

<sup>10</sup> Ibid

### C. Kantor Wilayah

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kementerian hukum dan hak asasi manusia memiliki cabang kantor yang terbagi menjadi banyak agar mempermudah dalam bertugas melayani masyarakat. Dalam segi pengawasanpun jadi lebih baik ketika kantor memiliki bagiannya masing-masing. Bisa menjadikan lebih fokus dalam bidangnya untuk melayani masyarakat. Berikut struktur bagan mengenai divisi yang di bagi dalam unit pelaksanaan teknis kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia :



Gambar 3.1 : struktur bagan unit pelaksanaan teknis kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia

## BAB IV HASIL LAPORAN MAGANG

### A. Laporan Kegiatan Harian

Progres dan aktifitas penulis selama dua bulan program magang berlangsung, sepenuhnya dibawah pengawasan ketua divisi HAM. Hal ini dikarenakan ada banyak tugas, kegiatan, dan berita bersifat rahasia yang tidak boleh dikerjakan tanpa perintah penuh dari ketua divisi HAM. Beberapa kegiatan harian yang biasa dilakukan tanpa menunggu instruksi dari ketua divisi HAM hanyalah menyusun laporan kasus HAM, menulis kasus pelanggaran HAM yang baru, dan mendampingi ketua divisi HAM dalam menyelesaikan masalah HAM. Adapun kegiatan selama program magang berlangsung penulis melampirkan sebagai berikut :

Hari, Tanggal	Keterangan
Jum'at 19 Agustus 2022	- Mempelajari berkas matriks kasus HAM yang terekam sejak akhir bulan 2021
Sabtu 20 Agustus 2022	- Libur
Minggu 21 Agustus 2022	- Libur
Senin 22 Agustus 2022	- Mendapatkan tugas dari kepala bidang HAM mengurutkan berkas aduan komunikasi masyarakat - Menginput berkas laporan kasus HAM
Selasa 23 Agustus 2022	- Melanjutkan penginputan berkas laporan kasus HAM
Rabu 24 Agustus 2022	- Meeting dengan kepala bidang HAM dalam mengurus masalah - Membantu kepala bidang HAM dalam menerima laporan kasus HAM secara langsung - Menganalisa kasus HAM yang di terima
Kamis 25 Agustus 2022	- Melanjutkan penginputan Kasus HAM - Melaporkan kepada kepala bidang HAM
Jum'at 26 Agustus 2022	- Membantu pengurus bagian HAM dalam menyusun surat
Sabtu 27 Agustus 2022	- Libur
Minggu 28 Agustus 2022	- Libur
Senin, 29 Agustus 2022	- Membantu pekerjaan KADIV (Ketua Divisi) dalam menulis data
Selasa, 30 Agustus 2022	- Membantu pekerjaan KADIV (Ketua Divisi) dalam menulis data

Rabu, 31 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pekerjaan KADIV (Ketua Divisi) dalam menulis data</li> <li>- Mengikuti kumpul Bersama KADIV</li> </ul>
Kamis, 1 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti kumpul Bersama KADIV dalam seminar "Diseminasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia menuju pelayanan public inklusif"</li> </ul>
Jum'at, 2 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan tugas yang di berikan KADIV</li> </ul>
Sabtu, 3 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libur</li> </ul>
Minggu, 4 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libur</li> </ul>
Senin, 5 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Pekerja bagian HAM</li> </ul>
Selasa, 6 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti perkumpulan bersama ketua divisi HAM dalam penyelesaian masalah tanah hijau</li> <li>- Menulis kesimpulan dari perkara yang di bahas</li> <li>- Membantu Pekerja bidang HAM</li> </ul>
Rabu, 7 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf Pekerja bagian HAM</li> <li>- Menginput data kasus HAM</li> </ul>
Kamis, 8 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja bidang HAM</li> <li>- Mendampingi staf pekerja HAM dalam meminta tanda tangan kepada notaris dan advokat yang terjerat kasus HAM</li> </ul>
Jum'at, 9 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja kantor bidang HAM</li> <li>- Menginput data permasalahan HAM</li> </ul>
Sabtu, 10 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libur</li> </ul>
Minggu, 11 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libur</li> </ul>
Senin, 12 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja kantor bidang HAM</li> </ul>
Selasa, 13 Setember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja kantor bidang HAM</li> </ul>
Rabu, 14 Septmber 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja kantor bidang HAM</li> </ul>
Kamis, 15 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu staf pekerja kantor bidang HAM</li> </ul>
Jum'at, 16 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendampingi bu KaDiv dalam acara "Global chain and Sustanaible supply chains : capacity and connectivity"</li> <li>- Mengikuti acara "Global chain and Sustanaible supply chains : capacity and connectivity"</li> <li>- Presentasi dan pengarahan selesainya Magang</li> <li>- Perpisahan dan Pamitan</li> </ul>

## **B. Manfaat kegiatan magang**

Poin-poin berikut adalah beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan magang, yaitu:

1. Memahami bagaimana ruang lingkup kerja dan apa yang menjadi tanggung jawab yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mendapatkan pengalaman kerja selama kurang lebih satu bulan di lembaga pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Timur
3. Mendapatkan kesempatan untuk mendampingi kepala divisi Hak Asasi Manusia dalam beberapa kegiatan penyelesaian masalah kasus HAM
4. Bertambahnya wawasan Hubungan Internasional pada umumnya dan kasus dalam perkara HAM khususnya.

Harapannya kegiatan magang tersebut dapat menjadi sarana dalam menjalin kerjasama (*networking*) antara Universitas Darussalam Gontor sebagai lembaga penyedia sumber daya manusia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi penyerap sumber daya manusia. Selanjutnya, penulis mengharapkan adanya masukan atau *feedback* dari instansi terkait dalam rangka pengembangan diri mahasiswa dan pengembangan institusi pendidikan.

## **C. Tiga Pilar Magang**

Dengan adanya kegiatan magang ini, penulis dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh jurusan untuk melaksanakan proses 3C (*Capacity Building, Corporate Promotion, and Community Empowerment*) di tempat magang, antara lain sebagai berikut :

### **a. *Capacity Building***

Pengetahuan mengenai Hubungan Internasional yang didapatkan dari tempat magang adalah mendapatkan materi-materi tentang penanganan kasus hak asasi manusia yang mana setiap individu yang ada di negara Indonesia harus berhak mendapatkan hak asasi nya dan apabila tidak mendapatkan haknya dapat melaporkan kasus tersebut kepada kantor penanganan di bagian hukum dan hak asasi manusia. Dari tempat magang tersebut juga menjadi lebih tau bahwa hak asasi manusia bukan hanya masalah sosialisasi antar manusia akan tetapi hak layak untuk bertempat tinggal atas tanah yang dimilikinya juga merupakan hak asasi manusia yang harus di peroleh masyarakat Indonesia apabila hak tersebut di ganggu atau di permasalahan oleh pemerintah kota atau daerah. Menambahkan wawasan mengenai hukum juga mahasiswa magang dapatkan karena untuk menganalisa kasus laporan pelanggaran yang masuk kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia di bidang HAM.

## **b. *Corporate Promotion***

Dalam upaya melaksanakan kegiatan promosi Universitas Darussalam Gontor, penulis melakukan promosi melalui dialog atau tukar pikiran dengan para staf atau karyawan yang ada di instansi tempat magang, yaitu :

1. Dengan memperkenalkan bahwa UNIDA Gontor saat ini memiliki 17 program studi yang salah satunya adalah Program Studi Hubungan Internasional. Program Studi Hubungan Internasional UNIDA berbeda dengan kampus lain dengan islamisasi ilmu pengetahuannya. Program studi Hubungan Internasional termasuk dalam prodi yang memiliki mahasiswa terbanyak di UNIDA Gontor.
2. Memperkenalkan bahwa Pondok Modern Darusslam Gontor berbeda dengan pondok salaf pada umumnya. Gontor adalah pondok pesantren modern bukan dalam arti fasilitas atau gedung mewah, melainkan dari sistem dan cara berpakaiannya.
3. Perilaku atau tata krama mahasiswa yang di miliki oleh UNIDA Gontor berbeda dengan kampus lain. Kaerena di sini kita di ajarkan pilar-pilar islam di setiap kehidupan yang mahasiswa UNIDA Gontor jalani di kesehariannya.
4. Mahasiswa UNIDA Gontor juga di paksa untuk bisa aktif dan kreatif dalam kesehariannya. Demi membawa kampus menuju *world class university*.

## **c. *Community Empowerment***

Beberapa kompetensi individu yang diperoleh selama magang berlangsung adalah:

1. Menambah keprofesionalitas dalam kinerja menangani kasus tentang pelanggaran HAM.
2. Memahami cara berkomunikasi dengan baik kepada atasan maupun kepada bapak/ibu staf/ karyawan di kantor.
3. Meningkatkan kedisiplinan diri dengan ketepatan waktu dan suasana lingkungan kerja yang cepat.
4. Meningkatkan ketelitian diri karena dituntut untuk mengingat berkas-berkas dan mengelurakan kembali apabila dibutuhkan.
5. Meningkatkan kesabaran diri karena tiap individu di lapangan kerja memiliki latar belakang yang berbeda.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini banyak memberikan nilai-nilai positif bagi mahasiswa. Salah satunya yaitu mendapatkan pengalaman serta merasakan bekerja langsung di instansi pemerintah dan melihat kinerja yang ada dalam instansi pemerintah. Kegiatan ini sebagai pengalaman bekerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan magang tidak jauh dari kata kekurangan, akan tetapi kekurangan yang ada diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi dimasa depan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Program magang yang telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 1 bulan memberikan banyak pengetahuan yang harus dikembangkan dan pengalaman baik yang harus diteruskan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang dasarnya sudah disinggung di perkuliahan dan dipahami pola penerapannya di berbagai masalah. Akan tetapi, ketika berada dalam lingkungan kerja divisi HAM, penulis mendapati ilmu-ilmu tersebut dari banyak sudut pandang dan penerapan yang berbeda. Lebih jauh, penulis juga menerima pengetahuan-pengetahuan baru secara langsung dari pelaku yang terlibat dalam banyak pengembangan dan pengkajian kebijakan. Hal yang demikian merupakan kesempatan berharga yang bisa penulis dapatkan, karena hanya sebagian kecil saja diketahui oleh khalayak ramai dan terekspos di media masa.

Pengalaman yang baru satu persatu penulis dapatkan di tempat magang seperti halnya menerima laporan kasus pelanggaran HAM, menganalisa kasus HAM, menyelediki kasus pelanggaran HAM, menulis laporan pelanggaran HAM. Pengalaman yang sangat berharga tersebut susah untuk di dapatkan dan tentunya di dapat dari kesempatan yang datang. Mendapatkan lingkungan kerja yang sangat ramah, baik, saling menyapa dan support antara satu dengan yang lainnya serta menjaga ibadah agama sungguh jarang di dapatkan. Di tempat kementerian hukum dan hak asasi manusia tentunya lingkungan jauh lebih baik daripada itu. Bertukar ilmu dan pengalaman dengan para staf dan pekerja di kementerian hukum dan HAM sungguh momen yang jarang di dapatkan untuk membuka wawasan. Belum tentu di tempat lain bisa di dapatkan apalagi di kampus.

Tidak hanya itu, setiap individu di lingkup kementerian hukum dan hak asasi manusia mereka bekerja secara professional dan bertanggung jawab dalam mengatasi setiap perkara dan kasus yang datang hari demi hari berganti. Akan tetapi lowongan pekerjaan yang di buka di kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak setiap tahunnya ada. Akhir dari kalimat penutup, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kampus serta jajaran dosen yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di tempat yang baru. Dan tidak lupa terkhusus kepada dosen pembimbing yang sangat baik hati membimbing dengan sepenuh hati dan ikhlas sampai akhir perjalanan magang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin, W. (2019, September 4). *Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia*. Retrieved from KEMENKUMHAM: <https://kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>
- Juliawanti, L. (2021, Juli 12). *lifepal*. Retrieved from <https://lifepal.co.id/media/apa-itu-magang/>
- Kemenkumham. (2016, September 8). *Kemenkumham*. Retrieved from <https://kemenkumham.go.id/profil/sejarah>
- Wikipedia. (n.d.). *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia*. Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Hukum\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Republik_Indonesia)

## Kritik dan Saran

### KESAN TERHADAP MAHASISWA MAGANG

- > Gilang anak yg sopan, dan responsif pertama datang, wajahnya selalu tegang dan tidak mudah tersenyum setelah di beritahu langsung berubah rilex dan mudah senyuman
- > semua pekerjaan yg di perintahkan, cepet di selesaikan dg baik

### SARAN TERHADAP MAHASISWA MAGANG

- > belajar lebih giat dan memperluas pengetahuan terkait dg bidang akademis terutama ttg peraturan = internasional
- > Meningkatkan skill bahasa Inggris karena akan terkait dg pekerjaannya nanti.

## Lampiran Sertifikat Magang



## Lampiran Galeri Kegiatan



### 1. Upacara harian setiap pagi



### 2. Pemberian materi kepada peserta magang



3. Seminar Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM menuju pelayanan publik inklusif



4. Penanganan kasus HAM oleh ketua divisi HAM tentang kasus Tanah Hijau Surabaya